

POLITIK BAHASA DALAM IQRA

Oleh : Indrawati *)

Abstract:

The decline is a sign of the beginning of the iqra literacy commanded Gabriel to educate people. Iqra (read) is a model of language education given to the Prophet Muhammad to be imitated and used as a reference by the developers of the language policy (policy language) in particular and education in general. Politics of language in iqra assert that language acquisition is the basis of all forms of education and preparation of human resources in a country. Thus, in the context of the Indonesia development of language education needs to be addressed through policy wisely national language.

Keywords : *Iqra, Literacy, Language Politics*

Pendahuluan

Iqra, upaya membangun literasi bangsa

Mahasuci Allah yang telah menganugerahi manusia dengan kemampuan berbahasa dan telah menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Alquran adalah firman Allah kepada Rasul Muhammad dan pembacaan firman itu sendiri dinilai sebagai ibadah. Artinya Islam dengan tegas mengharuskan membaca lewat wahyu yang pertama, *Iqra* (bacalah), dan wahyu itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Peristiwa itu menandai pelantikan Muhammad sebagai nabi.

Dari sejarah kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang tidak literat (illiterate), yakni tidak dapat membaca-tulis teks. Sewaktu diperintahkan membaca oleh Malaikat Jibril, dia menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Jibril mengulangnya sampai tiga kali. Jinril mengulangnya sampai tiga kali. Malaikat Jibril pasti mengetahui bahwa Rasul Muhammad tidak dapat membaca simbol tulis. Dalam ayat itu, imperatif 'Bacalah' sebagai verba transitif tidak diikuti objek sebagaimana lazimnya. Arti pragmatik dari fenomena sintaksis ini adalah bahwa perintah membaca itu tidak terbatas pada teks tertulis saja, tetapi juga teks tidak tertulis.

Alam semesta, langit, dan bumi dengan segala misterinya adalah fenomena yang tiada terhingga yang tidak mungkin disimbolkan lewat konvensi bahasa manusia. Difirmankan dalam Alquran bahwa nikmat (kekuasaan) Allah itu tidak terhitung jumlahnya, sehingga tidak dapat didokumentasikan lewat kuasa bahasa. Ilmu pengetahuan yang kita dokumentasikan selama ini tidak lebih dari sebutir pasir kecil di pantai dalam semesta kekuasaan Sang Khalik.

Perintah membaca sebagaimana diwahyukan pertama itu merujuk pada membaca di balik fenomena yang tampak (reading beyond text). Bisa jadi yang tampak itu hanya ilusi saja yang menyembunyikan kebenaran. Agar mendapatkan kebenaran itu, kita harus membaca demi kebenaran "dengan

menyebut nama Tuhanmu.” Artinya, Islam mengajarkan bahwa sesungguhnya Allah sebagai sumber absolut dari kebenaran. Pencarian ilmu dan teknologi yang tidak dilandasi kebenaran akan berbuah kesombongan dan berujung pada kerusakan.

Dalam keseharian, kita memahami bahwa kegiatan membaca pasti mensyaratkan adanya objek baca. Bila Allah telah menciptakan alam semesta sebagai objek *iqra*, maka manusi pun harus menciptakan objek baca, yakni teks tertulis: media massa, buku, jurnal, dokumentasi, dan sejenisnya. Tanpa kehadiran teks tertulis tidak akan ada kegiatan membaca. Tegasnya, Islam mewajibkan kita untuk berkarya tulis untuk memungkinkan adanya kegiatan membaca.

Nabi Muhammad SAW., telah berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai pahlawan literasi, terbukti dengan wahyu terakhir yang mengevaluasi kinerja nabi, yaitu bahwasanya ajaran Islam telah disampaikan kepada umat manusia dengan sempurna. Dan Allah merestui umat manusia memilih Islam sebagai jalan hidupnya.

Perintah *iqra* adalah politik bahasa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan rujukan oleh para pengembang kebijakan bahasa khususnya dan pendidikan pada umumnya. Menurut Alwasilah (2008:202) ada sejumlah prinsip yang dapat dipetik dari politik bahasa *iqra* sebagai berikut.

Pertama, membangun bangsa dan negara sesungguhnya membangun Sumber Daya Manusia (SDM), yakni dengan memberinya pendidikan yang diawali dengan pengembangan keterampilan baca-tulis atau literasi.

Kedua, membangun literasi mensyaratkan adanya teks tulis yang akan dijadikan objek *iqra*. Tanpa karya tulis tidak akan ada kegiatan membaca. Dengan demikian, tidaklah tepat menyimpulkan bahwa wahyu pertama tidak mewajibkan menulis. Sebab adanya karya tulis justru menjadi prakondisi bagi terjadinya peristiwa baca.

Ketiga, perlu adanya rujukan baku dalam berbahasa. Alquran dijanjikan Allah sebagai teks yang terlindungi dari segala intervensi dan rekayasa linguistik manusia. Implikasinya, kebijakan-kebijakan pendidikan seyogyanya merujuk kepada visi misi dan dasar filosofis yang telah dirumuskan terlebih dahulu.

Keempat, Nabi Muhammad sering disebut sebagai *the walking Quran* atau Quran berjalan. Nabi bukan saja yang paling mengetahui substansinya tetapi juga orang pertama yang mengamalkannya. Maknanya, seorang guru, dosen, pendidik, dan pemimpin seyogyanya memiliki pengetahuan lebih ihwal peraturan yang berlaku dan juga siap melaksanakannya sebagai teladan bagi para pengikutnya.

Kelima, Alquran diturunkan secara berangsur selama 23 tahun masa kenabian. Maknanya, ilmu pengetahuan itu diajarkan sedikit demi sedikit. Perlu waktu leluasa untuk memahami sebuah konsep dan melaksanakannya secara bertahap sebelum mengenal konsep lainnya. Dengan demikian, setiap konsep yang diajarkan akan dikuasai tuntas. Walhasil proses pendidikan memerlukan kesabaran pada pihak pemerintah, pendidik, dan terdidik.

Keenam, setiap ayat yang diwahyukan kepada nabi sesuai dengan konteks lokal dan zaman, yakni sesuai dengan masalah yang dihadapi nabi. Dengan kata lain, Sang Jibril mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran

kontekstual. Praktik demikian itu memudahkan pebelajar memaknaki konsep baru. Dalam hal ini kita pun menyadari bahwa untuk memahami sebuah ayat diperlukan pemahan ihwal *asbabun nuzul* yakni sebab turunnya ayat. Dalam pewahyuan pertama terjadi dialog antara Sang Nabi dan Sang Jibril. Maknanya adalah bahwa dialog kritis itu bagian dari pengajaran kontekstual agar pebelajar menjadi cerdas.

Ketujuh, Nabi Muhammad mengajarkan Alquran pertama kali kepada dirinya sendiri, istrinya, kerabat dekat, sahabat, dan kemudian pada masyarakat luas. Ini artinya Islam itu menghormati bahasa ibu yakni bahasa yang secara psikologis telah mendarah daging pada setiap manusia. Ini suatu model bahwa pendidikan itu seyogyanya dimulai di lingkungan rumah sendiri, kemudian berkembang ke pendidikan di luar rumah. Tegasnya orang tua adalah guru pendidik utama dan pertama, dan lebih bertanggung jawab daripada guru di sekolah.

Sebagai muslim seyogyanya kita memahami ajaran-ajaran yang diwahyukan Jibril kepada Nabi Muhammad. *Nuzululquran* adalah peristiwa langit yang telah meletakkan dasar-dasar politik bahasa dan politik pendidikan untuk dijadikan model pendidikan bahasa di muka bumi ini. Islam menegaskan bahwa penguasaan bahasa atau literasi merupakan dasar dari segala bentuk pendidikan dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kebhinnekaan Bahasa dan budaya

Kebhinnekaan suku, bangsa, agama, dan bahasa adalah bukti keagungan Allah. Allah telah menciptakan alam semesta raya dengan berbagai bentuk ciptaan di dalamnya: manusia, binatang, dan tumbuhan dan ini tersebar di seluruh muka bumi. Demikian pula dengan Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri atas beribu-ribu pulau dan ratusan bahasa yang digunakan oleh suku-suku bangsa yang berbeda yang berdiam di wilayah yang berbeda. Tetapi kebhinnekaan ini dapat diatasi dengan mempersatukan Indonesia dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia.

Tidak terbayangkan bila orang-orang cerdas pada zaman dahulu tidak memikirkan pentingnya satu bahasa persatuan yang pada waktu itu fungsinya hanya sebagai satu alat perjuangan belum sampai kepada fungsinya seperti sekarang ini.

Dalam perspektif Islam, dapat dilihat bahwa bahasa Alquran dapat mempersatukan umat Islam sedunia, di belahan manapun dia berada. Seharusnya ini menjadi pelajaran penting dan manusia bisa bercermin di dalamnya. Bila Alquran mampu menjadi alat yang mempersatukan muslim di dunia, maka pada skala yang lebih kecil masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dapat dipersatukan dalam semangat nasionalisme melalui bahasa Indonesia. Sungguh Alquran menjadi suatu model pembelajaran untuk menciptakan persatuan.

Dalam Alquran ditemukan konsep-konsep multilingualisme dan multikulturalisme. Konsep ini mendorong manusia untuk saling mengenal dapat kita lihat dalam QS. Alhujurat: 13 yang artinya adalah: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Pada surat yang lain dapat dilihat bahwa para rasul diutus dengan menggunakan bahasa masyarakat setempat dalam komunikasi (QS. Ibrahim:4), yang artinya adalah: “Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Mahakuasa lagi Mahabijaksana.

Konsep lainnya adalah berlainan bahasa merupakan petunjuk kekuasaan Allah (QS. Arrum:22) yang artinya adalah: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

Sementara itu manusia dituntut untuk mengembangkan semangat literasi seperti tercermin dalam (QS.Qalam:1) yang artinya “bacalah”.

Dalam hal ini, mempelajari bahasa ibu, nasional, dan bahasa asing patut disimak sebagai upaya yang tak terceraiikan dalam komunikasi antarmanusia dan manusia dengan Khaliknya. Dari sini berkembanglah ilmu bahasa, cara mempelajari bahasa, dan cara berbahasa (berkomunikasi).

Pada tahap berikutnya, studi bahasa melahirkan berbagai spesialisasi linguistik murni dan linguistik terapan seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis; dan spesialisasi pendidikan bahasa (ibu, nasional, asing). Komunikasi antardisiplin ilmu juga melahirkan spesialisasi sinergis seperti sinergi linguistik dan sosiologi melahirkan sosiolinguistik dan dari hubungannya dengan psikologi melahirkan psikolinguistik.

Politik bahasa nasional

Politik bahasa nasional ialah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahannya, dan ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan (Alwasilah: 1985).

Menurut Mulyono (2011: 4) dalam pustaka politik bahasa nasional dirumuskan bahwa ketiga jenis bahasa (daerah, Indonesia, asing) memiliki kedudukan dan fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupannya di negara kita.

Salah satu yang masalah kebahasaan yang perumusan dan dasar penggarapannya perlu dicakup oleh kebijakan nasional di dalam bidang kebahasaan adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya, sedangkan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang, nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan.

Bahasa Indonesia, dalam kehidupannya diberi dua macam kedudukan sebagai bahasa nasional dengan landasan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 dan sebagai bahasa negara dengan landasan UUD 1945.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mengemban empat macam fungsi, yakni fungsi (1) sebagai bahasa resmi

kenegaraan, (2) sebagai bahasa pengantar pendidikan, (3) sebagai alat komunikasi antardaerah dan antarbudaya, dan (4) sebagai alat komunikasi, pelestari, pembina, dan pengembang IPTEKS. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia jugamendukung empat fungsi, yakni sebagai lambang kebanggaan nasiona, lambang identitas nasional, sebagai perekat rasa persatuan berbangsa dan bernegara dan juga sebagai alat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Bahasa daerah yang jumlahnya ratusan itu, sesuai dengan namanya berkedudukan sebagai bahasa daerah. Ada empat macam fungsi yang didukungnya, yaitu (1) sebagai alat komunikasi intradaerah, (2) sebagai bahasa komunikasi, pelestari, pembina, serta bahasa pengembang kebudayaan daerah, (3) sebagai bahasa pengantar pendidikan di daerah (s.d. kelas 3 sekolah dasar), dan (4) sebagai pemer kaya bahasa Indonesia.

Seperti halnya bahasa daerah, bahasa asing di negara ini berkedudukan sebagai bahasa asing dengan fungsi-fungsi yang didukungnya di antaranya adalah (1) alat komunikasi antarbangsa, (2) bahasa sumber ilmu pengetahuan, (3) bahasa pengantar pendidikan di lembaga-lembaga yang relevan, dan (5) pemer kaya bahasa Indonesia.

Pembinaan dan pengembangan

Pembinaan dan pengembangan dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan adalah usaha-usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Usaha-usaha yang dimaksud tidak hanya menyangkut masalah bahasa tetapi juga masalah kesusastraan karena kesusastraan merupakan faktor penunjang perkembangan bahasa dan kebudayaan yang bersangkutan.

Pada dasarnya masalah pengajaran bahasa (nasional, daerah, maupun asing) akan selalu berkuat dengan persoalan bahasa standar. Standardisasi bahasa mencakup dua hal: standardisasi bahasa dalam pengertian bahasa standar (baku) dan standardisasi bahasa dalam pengertian pengkodefikasian aspek-aspek kebahasaan (Danardana: 2011).

Selain upaya pembinaan dan pengembangan, upaya pemertahanan bahasa (language maintenance) juga menjadi penting dalam wacana ini. Pemertahanan bahas lazim didefinisikan sebagai upaya yang disengaja untuk mempertahankan penggunaan bahasa tertentu di tengah “ancaman” bahasa yang lain (Danardana: 2011).

Dalam konteks Indonesia, yang sebagian penduduknya bilingual (menguasai lebih dari satu bahasa), pemertahanan bahasa sebenarnya tidak cukup hanya diterapkan pada bahasa daerah, tetapi juga pada bahasa Indonesia. Harus diakui bahwa terpaan arus globalisasi dan berhembusnya gerakan reformasi telah menciptakan paradoks pada dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Bangsa Indonesia sangat mengagumi sesuatu yang berbau asing, tidak terkecuali dalam bahasa. Ruhnya kata-kata asing telah mendominasi semua bentuk komunikasi bangsa ini dan sangat disayangkan karena kata-kata asing yang digunakan tidak mewakili konsep baru tetapi menggeser kata-kata yang sudah ada.

Atas kenyataan itu, agar tidak musnah terbawa arus global, mau tidak mau harus mempertebal rasa nasionalisme, membangun keindonesiaan berdasarkan jati diri bangsa Indonesia.

Penutup

Perintah membaca yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad merupakan sebuah petunjuk bahwa setiap manusia harus mempunyai kemampuan literasi. Literasi adalah persoalan manusiawi yang sama pentingnya dengan sandang dan pangan. Kemampuan literasi ini adalah kemampuan baca tulis sebagai bagian dari penguasaan bahasa. Oleh karena negara Indonesia adalah negara yang mengakui kebhinnekaan suku, bangsa, agama, dan bahasa maka diperlukan kearifan dalam mengelola masalah-masalah kebahasaan yang ada. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk politik bahasa nasional yang mengatur keberlangsungan bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Dalam hal merumuskan politik bahasa nasional kiranya penting untuk mencermati prinsip-prinsip politik bahasa dalam *iqra*.

Daftar Pustaka

- Alwasilah, Chaedar. 1985. Sosiologi Bahasa. Bandung: Angkasa.
- , 1997. Politik Bahasa dan Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.
- , 2008. Filsafat Bahasa dan Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. 1971. Alquran dan terjemahnya.
- Mulyono, Iyo. 2011. Cerdas Bahasa Cerdas Komunikasi. Bandung: Yrama Widya.
- Sri Danardana, Agus. 2011. Anomali Bahasa. Pekanbaru: Palagan press